

Mitigasi Ketidapatuhan Umkm Dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Entitas Mikro Kecil Menengah (Emkm)

Mochammad Fadhil Abdullah¹ Icha Mustamin² Nurjannah³

Politeknik Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (literature review). Penelitian terlebih dahulu melakukan eksplorasi dan identifikasi terkait permasalahan ketidakpatuhan penerapan SAK EMKM kemudian melakukan identifikasi potensi UMKM dalam penerapan SAK EMKM selanjutnya merumuskan konsep mitigasi. Hasil penelitian mitigasi atas ketidakpatuhan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM, yaitu : ,Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan. , Melakukan pendampingan intim seperti, pemberdayaan, membuka layanan konsultasi, supervisi dan peningkatan literasi terkait konsep dan urgensi akuntansi. , Sosialisasi SAK EMKM bisa dilakukan dengan beberapa metode seminar, loka karya atau pelatihan. Diperkuat menggunakan instrumen media elektronik, media cetak maupun platform digital., Maksimalisasi peran pemerintah sebagai regulator secara persuasive, Kolaborasi lintas sektor seperti universitas sebagai wujud pengamalan Tri Dharma perguruan tinggi, kemudian ada juga asosiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan juga pihak swasta seperti kantor akuntan berpraktik.

Kata Kunci: Mitigasi, UMKM, SAK EMKM

Copyright (c) 2024 Angga Septian

✉ Corresponding author :

Email Address : anggaspt2002@gmail.com

PENDAHULUAN

Eksistensi UMKM sebagai salah satu penunjang perekonomian Indonesia dapat diperhitungkan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar (Anton et al., 2015). Sumbangsih UMKM sangat besar bagi pendapatan negara juga dalam menurunkan jumlah pengangguran (Salmiah et al., 2015). Peran UMKM dalam era revolusi industri 4.0 di Indonesia sangat diperhitungkan (Abdelhafid & Mohammed, 2019). UMKM merupakan ekonomi dengan karakteristik kemasyarakatan dengan kontribusi signifikan bagi negara (Purba, 2019). Eksistensi UMKM di indonesia terkonfirmasi memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian negara baik dari segi pendapatan negara maupun dalam menyerap tenaga kerja.

Dinamisnya persaingan usaha memasuki era globalisasi masih lemahnya daya saing UMKM akibat terbatasnya akses permodalan, penguasaan teknologi minim, serta rendahnya kualitas SDM (Anggraini, 2021). UMKM banyak menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah pendanaan. Terlalu fokus pada proses produksi dan operasional, sehingga pelaku UMKM tidak memperhatikan pembukuan dan laporan keuangan (Tuti & Dwijayanti, 2016). Permasalahan akses permodalan salah satu penghambat UMKM untuk berkembang (Suryani et al., 2015). Salah satu kendala lemahnya daya saing UMKM disebabkan sulitnya akses terhadap pembiayaan dan informasi kredit sehingga kegiatan usaha UMKM terhambat (Zhou et al., 2019; Magdi et al., 2019). Fenomena UMKM sebagai lembaga usaha skala kecil dan serba terbatas selalu menghadapi masalah klasik terkait terbatasnya modal serta sulitnya mengakses permodalan dilembaga keuangan.

Pemerintah memfasilitasi UMKM untuk akses kredit permodalan dengan mudah. Namun, salah satu syarat untuk mengaksesnya dengan laporan keuangan sebagai informasi untuk menilai kemampuan bayar UMKM meminimalisir risiko kredit (Luchindawati et al., 2021). Masalah UMKM untuk memperoleh dana dari pihak lembaga keuangan salah satunya disebabkan oleh tidak tersedianya informasi yang relevan mengenai pencatatan transaksi dalam operasional usaha (laporan keuangan) sebagai dasar pihak bank atau lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman modal (Rudiantoro & Siregar, 2012). Data Dinas Koperasi dan UMKM merilis akses kredit UMKM melalui lembaga perbankan masih sangat minim karena tidak tersedianya informasi yang representatif terkait usaha UMKM (Andari et al., 2022). Terlibatnya pihak eksternal UMKM seperti kreditur dan supplier maupun pihak yang berkepentingan lainnya membuat laporan keuangan sesuai standar sangat dibutuhkan. Tujuannya agar pihak eksternal dengan mudah mengakses informasi keuangan perusahaan (Amani, 2018). Salah satu penilaian untuk pemberian pinjaman modal berdasarkan data keuangan dari calon debitur. Tidak mampunya pelaku UMKM menyediakan laporan keuangan merupakan pengambat pelaku UMKM untuk akses kredit.

Pemerintah Indonesia menegakkan aturan bagi UMKM untuk melaksanakan pencatatan transaksi keuangan dalam Peraturan Pemerintah No/17/2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Andari et al., 2022). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. SAK EMKM berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 untuk membantu dan mendorong kemajuan UMKM (Rismawandi et al., 2022). Keandalan informasi laporan keuangan merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mengakses kredit permodalan di lembaga keuangan. Selain itu juga digunakan pelaporan pajak maupun tujuan internal pelaku UMKM untuk pengambilan keputusan ekonomis (Suraji, 2020). Kehadiran SAK EMKM diharapkan mampu mendorong UMKM menyeleggarakan laporan keuangan pada usahanya. Mengingat pentingnya informasi keuangan untuk berkembangnya suatu usaha, termasuk UMKM.

Komponen laporan keuangan pada umumnya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI, 2015). Laporan keuangan (Financial Statements) adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data

keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihakpihak yang berkepentingan (Nuvitasari et al., 2019). Laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan menilai atas kondisi posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Laporan keuangan juga dapat dijadikan dasar informasi untuk keberlangsungan UMKM dimasa yang akan datang

Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2015). Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna untuk mengambil keputusan (Andari et al., 2022). Disusnya laporan keuangan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat digunakan bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Rismawandi et al., 2022). Laporan keuangan pada dasarnya merupakan penyajian pertanggung jawaban manajemen pengelola atas keputusan ekonomi yang telah dilaksanakan.

Implementasi SAK EMKM masih sangat rendah, terkait sosialisai kepada pelaku UMKM dirasakan kurang menyeluruh sehingga pelaku UMKM belum menerapkan (Luchindawati et al., 2021). Membuat pencatatan akuntansi yang baik bagi UMKM sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No/17/2013 walaupun fenomenanya masih banyak UMKM yang tidak melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Adryant & Rita, 2020). SAK EMKM merupakan Standar pencatatan bagi entitas yang bersifat tidak memiliki akuntabilitas publik salah satunya UMKM. SAK EMKM diharapkan mampu membantu dan memudahkan para pelaku umkm dalam menyajikan laporan keuangan. Salah satu karakteristik SAK EMKM simpel dan mudah dipahami sehingga lebih mudah untuk diterapkan (Suraji, 2020). SAK EMKM diterbitkan untuk pelaku UMKM yang saat ini jumlahnya sangat besar di Indonesia. Banyak pelaku memiliki prospek usaha yang bagus tapi terbatas akses permodalan, khususnya perbankan. Umumnya kendala yang dihadapi UMKM ini tidak ada laporan keuangan sebagai dasar perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menilai kinerja usaha mereka (Siregar, 2021). Standar akuntansi untuk UMKM diperuntukkan salah satunya untuk mengatasi kos pembiayaan pelaporan keuangan yang sebagian pelaku UMKM masih merasa berat (Madawaki, 2012). SAK EMKM disusun agar dapat mendorong dan memfasilitasi kebutuhan akan pelaporan keuangan UMKM. Diharapkan kerangka pelaporannya dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pencatatan tradisional menuju pelaporan yang terstruktur dan akuntabel.

Posisi laporan keuangan bagi kinerja perusahaan itu sangat penting, maka penyusunan laporan keuangan tidak bisa dilakukan sembarangan dan asal asalan namun harus dengan cermat dan tidak bias. Selain itu, suatu laporan keuangan hendaknya dapat diinterpretasikan oleh pihak berkepentingan dengan cara pandang

yang sama. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar akuntansi (Kareja et al., 2022). Penggunaan SAK EMKM sebagai standar pelaporan keuangan bagi UMKM dapat meyakinkan investor atau lembaga keuangan sehingga lebih mempunyai peluang untuk pengembangan usaha kedepannya (Andari et al., 2022). Penerapan SAK EMKM memudahkan pihak Bank memantau profitabilitas pelaku usaha dan kemajuannya, dan juga peluang untuk investor menanamkan modalnya lebih terbuka (Mukoffi & Sulistiyowati, 2019). Laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang sesuai merupakan aspek yang dapat dijadikan dasar informasi untuk keberlangsungan UMKM dimasa yang akan datang

Impementasi SAK EMKM pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan dapat dijafikan sebagai informasi yang andal untuk menilai keberlangsungan usaha UMKM di masa depan (Kirowati, 2019). Laporan keuangan merupakan dasar informasi untuk mengetahui arus kas perusahaan pada suatu periode sehingga dapat mengetahui kondisi atau kinerja perusahaan (Badria, 2018). SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelapor keuangan UMKM yang sebelumnya mengikuti SAK ETAP (Sularsih & Sobir, 2019). Konsekuensi revolusi industri 4.0 membuat kemajuan teknologi informasi dibidang bisnis sangat pesat. Pencatatan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar keuangan akan mempermudah para pelaku usaha UMKM dalam persaingan pasar yang sangat dinamis tersebut (Janrosl, 2018; Kusuma & Lutfiany, 2019; Mukoffi & Sulistiyowati, 2019; Purba et al., 2019). UMKM pada era industri yang sangat pesat dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis salah satunya UMKM harus aktual pada model pencatatan dan aturan laporan keuangan yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan usahanya di masa depan.

Fenomena saat ini mayoritas UMKM hanya membuat catatan keuangan sangat sederhana atau bahkan belum memiliki laporan keuangan sama sekali (Abdelhafid & Mohammed, 2019). UMKM dalam mengimplemantasikan standar akuntansi masih sangat minim dan terbatas. Presepsi Pelaku UMKM bahwa sedikit manfaat diperoleh dari mematuhi standar akuntansi, kemudian rendahnya pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM terkait standar akuntansi membuat ketidakpatuhan dalam penerapan standar akuntansi (Dang, 2011). Pemahaman yang masih minim terkait pencatatan keuangan, dan asumsi pelaku UMKM terkait lapran keuangan tidak penting merupakan salah satu faktor ketidakpatuhan UMKM dalam membuat laporan keuangan (Pratiwi & Hanafi, 2016). Pelaku UMKM belum sadar akan urgensi sebuah pencatatan dalam kelangsungan usaha. Pemikiran mayoritas UMKM menganggap akuntansi merupakan hal yang sulit dan merasa belum memerlukan pencatatan, (Soraya & Mahmud, 2016). Kurangnya pemahaman terkait urgensi penerapan SAK EMKM, serta ketidakmampuan dan ketidakmauan sumber daya atau pelaku UMKM untuk menggunakan akuntansi dalam kaitannya SAK EMKM menjadi salah satu faktor penghambat UMKM tidak berkembang karena akses permodalan yang terbatas baik dari investor maupun lembaga keuangan yang mensyaratkan laporan keuangan yang kredibel dan andal untuk mengakses tambahan modal.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK EMKM memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi pelaku UMKM seperti, menghitung dan menetapkan harga pokok dan harga jual produk, membantu dalam perhitungan maupun pelaporan pajak, menyajikan informasi posisi keuangan yang bermanfaat bagi manajemen maupun pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, membantu untuk akses

pembiayaan modal usaha dilembaga keuangan maupun bagi investor, dan juga dapat digunakan untuk menilai kinerja atau mengukur kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Diharapkan dengan adanya SAK EMKM akan meningkatkan profesionalitas dari UMKM serta membantu pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia. Namun realitas yang terjadi pelaku UMKM dalam mematuhi standar akuntansi SAK EMKM sangatlah terbatas, mayoritas UMKM hanya membuat catatan keuangan sangat sederhana atau bahkan belum memiliki laporan keuangan sama sekali. Berangkat dari urgensi penggunaan dan penerapan SAK EMKM serta fenomena keterbatasan UMKM dalam kepatuhan penerapannya penulis akan melakukan penelitian secara literature review untuk merumuskan konsep mitigasi terkait ketidakpatuhan UMKM dalam penerapan SAK EMKM.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (literature review). Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang relevan terkait masalah penelitian dengan menelaah dari beberapa kepustakaan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, transkrip, surat kabar dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian. Tulisan ini terlebih dahulu melakukan eksplorasi dan identifikasi terkait permasalahan ketidakpatuhan penerapan SAK EMKM kemudian melakukan identifikasi potensi UMKM dalam penerapan SAK EMKM kemudian merumuskan konsep mitigasi ketidakpatuhan UMKM dalam penerapan SAK EMKM.

HASIL PEMBAHASAN

Ketidakpatuhan UMKM Dalam Penerapan SAK EMKM

Permasalahan UMKM berkaitan bidang pengelolaan keuangan antara lain omset tidak signifikan, kinerja keuangan buruk, laba yang tidak menutupi oprasional, dan ketidakmampuan sumber daya untuk menggunakan akuntansi (Andayani et al., 2021). Kurangnya pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah akibat kualitas sumber daya manusia yang masih kurang terkait pemahaman akuntansi (Nuvitasari et al., 2019). UMKM dalam melaksanakan praktik pencatatan keuangan masih mengalami kendala dan kelemahan akibat kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan tingkat pendidikan yang minim (Sulisti, 2019). Rendahnya pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM terkait standar akuntansi membuat ketidakpatuhan dalam penerapan standar akuntansi (Dang, 2011). Penyusunan laporan keuangan tidak semua pelaku UMKM mampu dan paham. Fenomena tersebut karena minimnya pemahaman dan pengetahuan penyusunan laporan keuangan yang benar. Mayoritas pelaku UMKM masih mencampur pengelolaan keuangan pribadi dan usahanya mereka belum bisa melakukan pemisahan dana pribadi dengan entitasnya (Luchindawati et al., 2021). Beberapa penelitian diatas mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM karena kapasitas SDM dengan pemahaman dan pendidikan yang masih sangat minim dan terbatas.

Fenomena terbatas dan minimnya pelaku UMKM dalam mematuhi standar akuntansi merupakan sebuah ironi. Presepsi Pelaku UMKM bahwa sedikit manfaat yang dirasakan dengan mematuhi standar akuntansi (Dang, 2011). Pemahaman yang masih minim terkait pencatatan keuangan, dan asumsi pelaku UMKM terkait lapran keuangan tidak penting

merupakan salah satu faktor ketidakpatuhan UMKM dalam membuat laporan keuangan (Pratiwi & Hanafi, 2016). Pemikiran yang berkembang dikalangan pelaku UMKM bahwa pelaporan tidak punya pengaruh signifikan pada kemajuan usaha sehingga laporan keuangan dibuat sembarangan (Siregar, 2021). UMKM berasumsi bahwa pencatatan keuangan merupakan sesuatu yang sulit, skala ukuran usaha yang masih kecil sehingga pelaku umkm tidak terlalu peduli terkait pencatatan keuangan dalam usahanya (Soraya & Mahmud, 2016). Fenomena lain yang menyebabkan ketidakpatuhan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM yaitu literasi umkm terkait pentingnya SAK EMKM masih sangat minim.

Tidak tersampainya penyuluhan serta pelatihan yang berkaitan dengan SAK EMKM berdampak pada ketidakpatuhan UMKM dalam melakukan implementasi SAK EMKM (Sholikin & Setiawan, 2018). UMKM tidak menerapkan SAK EMKM karena tidak adanya motivasi dan kurangnya sosialisasi lembaga terkait perihal pentingnya melakukan pelaporan sesuai standar (Putra, 2018). Sosialisasi SAK EMKM yang belum bisa menjangkau berbagai pelaku UMKM berakibat ketidakpatuhan pada pengimplementasiannya (Wulandari & Arza, 2022). Kurang sampainya akses informasi dalam bentuk sosialisasi ataupun penyuluhan membuat pelaku UMKM belum sepenuhnya menerapkan SAK EMKM (Kusuma & Lutfiany, 2019). Meskipun peraturan pencatatan akuntansi telah jelas adanya, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar. Berdasarkan penelitian rujukan yang telah ditelaah diatas ada beberapa point pokok yang bisa diidentifikasi terkait ketidakpatuhan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM yaitu kualitas SDM yang terbatas, baik dari segi pendidikan, pemahaman ataupun pengalaman, selanjutnya tingkat literasi UMKM terhadap SAK EMKM masih sangat minim, dan terakhir masih kurangnya sosialisasi ataupun penyuluhan kepada UMKM terkait urgensi dan implementasi SAK EMKM.

Potensi UMKM Dalam Penerapan SAK EMKM

Badan Pusat Statistik mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang mempekerjakan 1- 4 orang, usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan 5-19 orang, dan usaha sedang adalah usaha yang mempekerjakan 20-99 orang (BPS, 2020). Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk maju dan berkembang ditentukan salah satunya oleh kemampuan pelaku-pelakunya dalam mengelola oprasional usaha dan menciptakan inovasi (Andari et al., 2022). Minimal UMKM memiliki SDM 1- 4 orang yang berpotensi ditingkatkan kapasitas pemahaman dan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan instrumen inti baik perusahaan skala besar maupun UMKM sebagai roda penggerak utama dalam berjalannya seluruh aktivitas kegiatan usaha.

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada saat ini. Teknologi informasi atau sering dikenal dengan istilah Information Technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam mendapatkan, mengubah, menyimpan, mengelola dan/atau menyebarkan informasi (Williams et al., 2009). Kehadiran teknologi informasi yang sangat dinamis dapat mempermudah dan mendukung berbagai praktik kegiatan perusahaan baik secara oprasional maupun secara inovasi (Tan et al., 2007). Bukan hanya perusahaan besar yang memanfaatkan IT, perusahaan kecil dan menengah pun memanfaatkan IT karena akses yang cukup mudah dijangkau serta tersedianya platform-platform yang

bervariasi yang bisa membantu berbagai pekerjaan (Andriyanto, 2018). Hampir seluruh kegiatan sehari-hari kita didukung oleh IT tersebut. Banyak masyarakat yang menggunakan IT dalam kehidupan sehari-hari untuk bekerja, belajar skill dan pengetahuan baru, mencari informasi seputar pendidikan, bisnis, hiburan, berita, atau politik tidak terkecuali para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. IT semakin mudah diakses untuk dimanfaatkan para pengusaha termasuk dalam pengembangan kemampuan dan pengetahuan pengelolaan keuangan dan pelaporan.

Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat diperlukan karena UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Keban, 2008). Dalam upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini maka pemerintah maupun instansi teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendukung dan bersinergi dengan UMKM dalam bentuk dukungan baik itu secara fasilitas maupun kebijakan (Suraji, 2020). Pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu dukungan dari berbagai aspek. Seperti adanya program pendampingan dari unit kerja pemerintah maupun lembaga yang dibentuk sebagai mitra untuk menguatkan eksistensi UMKM di dunia pasar (Susilowati et al., 2021). Pemerintah telah mengakui peran penting yang dimainkan oleh UMKM dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. Keberpihakan pemerintah sebagai regulator merupakan potensi yang sangat menjanjikan bagi UMKM termasuk dalam pengembangan dan pemahaman dalam penerapan SAK EMKM.

Mitigasi Ketidakpatuhan UMKM Dalam Penerapan SAK EMKM

Mitigasi merupakan upaya eliminasi atau mengurangi frekuensi dari suatu masalah, risiko atau kesenjangan/gap untuk meminimalisasi dampak potensial dari suatu risiko (Wahyudi, et al., 2013). Mitigasi dilakukan untuk menentukan tindakan pencegahan pada inisiatif strategis agar tingkat risiko yang diterima lebih kecil untuk gagal (Oke et al., 2021). Dalam Penerapan SAK EMKM konsep mitigasi dibuat untuk mengurangi frekuensi dari suatu masalah atau risiko atas ketidakpatuhan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk maju dan berkembang ditentukan salah satunya oleh kemampuan pelaku-pelakunya dalam mengelola operasional usaha dan menciptakan inovasi (Andari et al., 2022). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Rismawandi et al., 2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan adalah upaya untuk mengasah keahlian yang dimiliki tiap perseorangan guna memperoleh kemampuan dalam menyusun laporan keuangan usahanya. Jika pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap UMKM diberikan dengan baik kemudian menerapkan ilmu yang telah di dapat, maka akan meningkatkan ilmu pengetahuan akuntansi sehingga pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan di bidang akuntansi akan meningkatkan pemahamannya dalam menyusun laporan keuangan (Auliah & Kaukab, 2019). Hasil penelitian dari (Prasetyo, 2018; Hasani & Nuzul Ainy, 2019) mendukung bahwa pelatihan akuntansi memiliki dampak yang signifikan atas penyusunan laporan keuangan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan bisa dilakukan dengan pendidikan atau pelatihan akuntansi sesuai standar SAK EMKM. Hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah atau instansi teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pendidikan atau pelatihan merupakan wujud dukungan pemerintah bagi masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM UMKM sehingga menjadikan UMKM terampil dan paham terkait SAK EMKM.

Pemerintah juga bisa melakukan kolaborasi lintas sektor seperti universitas sebagai wujud pengamalan tri dharma perguruan tinggi, kemudian ada juga asosiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan juga pihak swasta seperti kantor akuntan berpraktik. Beberapa lembaga tersebut memiliki kecakapan dan kapasitas yang mumpuni untuk melakukan pelatihan dan pengajaran terkait SAK EMKM. Selain itu, salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di sektor UMKM adalah Pendampingan. Pendampingan UMKM memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping yaitu memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan terkait kemampuan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM. Konsep pendampingan bukan hanya sekedar penyusunan laporan keuangan tapi lebih melakukan pendampingan intim seperti, membuka layanan konsultasi, supervisi dan peningkatan literasi terkait konsep dan urgensi akuntansi. Upaya-upaya tersebut tersebut dilakukan untuk mengedukasi pelaku UMKM sehingga SAK EMKM sebagai pedoman standar pelaporan bagi UMKM dapat diimplementasikan secara optimal.

Sosialisasi SAK EMKM merupakan proses yang sangat penting bagi pelaku UMKM untuk belajar menyesuaikan dan mengkoordinasikan perilakunya dengan peranan dan peraturan yang ditetapkan dalam SAK EMKM (Andari et al., 2022). Sosialisasi SAK EMKM bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti, seminar, loka karya atau pelatihan. Transformasi informasi SAK EMKM juga bisa dilakukan menggunakan media elektronik, media cetak maupun platform digital. Inti pokok dari program sosialisasi yaitu informasi yang ingin disampaikan bisa tepat sasaran khususnya kepada UMKM, sehingga bisa membangun pemahaman dan kesadaran UMKM terkait pentingnya penggunaan dan implementasi SAK EMKM. Sosialisasi SAK EMKM perlu dukungan dari berbagai pihak. Hasilnya akan semakin maksimal bila berbagai pihak yang kompeten berkolaborasi guna mewujudkan literasi UMKM yang baik terhadap SAK EMKM.

Peran pemerintah sebagai leading sektor sekaligus regulator dalam pengembangan UMKM bisa mengambil peran untuk melakukan mitigasi ketidakpatuhan UMKM dalam penerapan SAK EMKM. Seperti halnya untuk mendapatkan akses permodalan mensyaratkan laporan keuangan sesuai standar keuangan sebagai salah satu komponen yang harus dipenuhi. Pemerintah atau instansi terkait juga bisa melakukan hal tersebut sebagai regulator mensyaratkan adanya laporan SAK EMKM sebagai syarat administratif seperti syarat mengurus legalitas pendirian/perpanjangan usaha, syarat memperoleh izin usaha, ataupun berkaitan dengan pemberian bantuan hibah modal usaha. Langkah tersebut sebagai bentuk dorongan secara persuasif untuk membangun kesadaran pentingnya melakukan pencatatan sesuai SAK EMKM. Pentingnya laporan keuangan bagi suatu usaha untuk memberikan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

SIMPULAN

Laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang sesuai merupakan aspek yang dapat dijadikan dasar informasi untuk keberlangsungan UMKM dimasa yang akan datang. Penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK EMKM memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi pelaku UMKM seperti, menghitung dan menetapkan harga pokok dan harga jual produk, membantu dalam perhitungan maupun pelaporan pajak, menyajikan informasi posisi keuangan yang bermanfaat bagi manajemen maupun pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi,

membantu untuk akses pembiayaan modal usaha dilembaga keuangan maupun bagi investor, dan juga dapat digunakan untuk menilai kinerja atau mengukur kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Referensi :

- Abdelhafid, M., & Mohammed, S. (2019). The Impact of information asymmetry on the bank financing of SMEs in Algeria: An econometric study. *International Journal of Inspiration & Resilience Economy*, 3(1): 17-23. <https://doi.org/10.5923/j.ijire.20190301.03>
- Adryant, V., & Rita, M. R. (2020). Pemahaman sak emkm, sosialisasi laporan keuangan dan penerapan sak emkm dengan moderasi ukuran usaha. *JURNAL AKUNTANSI*, 15, 54-65. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Agung, I. G., Pertama, W., & Sutapa, I. N. (2020). TINGKAT PENERAPAN SAK EMKM PADA PELAKU UMKM DAN. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 63-68. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna%0ATINGKAT>
- Amani, T.,(2018). "Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo)," *Assets*, vol. 2, no. 2, pp. 12-20, 2018.
- Andari, A. T., Setianingsih, N. A., & Aalin, E. R. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Ukuran Usaha dan Sosialisasi SAK EMKM Terhadap. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6, 3680-3689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1109>
- Andriyanto, I. (2018). Penguatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui E-Commerce. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 87-100.
- Anggraini, L. D. (2021). Implementation of SAK-EMKM Towards Controlling Financial Statements on Msmes in Palembang City. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(2), 437-441.
- Anton, S. A. et al. (2015) 'An Assessment of SME Competitiveness in Indonesia', *Journal of Competitiveness*, 7(2), pp. 60-74. <https://doi.org/10.7441/joc.2015.02.04>
- Auliah, M. R., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Umkm Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 131-139
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badria, N. (2018). Persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK EMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM 1 Januari 2018. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Unisma*.7(1), 55-66
- Baron, Robert A. 2009. Psikologi Sosial Jilid I Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga. <http://202.162.35.204:8191/opac/DetailOpacBlank.aspx?id=3629>
- Dang-Duc, S. (2011), "Compliance with accounting standards by SMEs in transitional economies: evidence from Vietnam", *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 12 No. 2, pp. 96-107. <https://doi.org/10.1108/09675421111160673>
- Divianto & Febriyanty. (2017). Pengaruh pemahaman pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan terhadap implementasi laporan keuangan berdasar SAK ETAP dengan persepsi pelaku UKM sebagai moderating variable. *International Jurnal of Social Science and Bussines*. Vol.1, No. 1, 166-176
- Falkner, E. M., & Hiebl, M. R. W. (2015). Risk management in SMEs: a systematic review of available evidence. *Journal of Risk Finance*, 16(2), 122-144. <https://doi.org/10.1108/JRF-06-2014-0079>

- Hartono. (2006). Kepatuhan Kemandirian Santri (Analisis Psikologi), *Jurnal Study Islam dan Budaya*. 4(1), 50–66. <https://adoc.pub/download/kepatuhan-dan-kemandirian-santri-sebuah-analisis-psikologis-.html?reader=1>
- Hasani, R., & Nuzul Ainy, R. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UMKM DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM). Universitas Ahmad Dahlan.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Laporan Keuangan, Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). SAK (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH). SAK EMKM. <https://doi.org/10.1021/nl2023405>
- Janrosl, V. S. E. (2018). Analisis persepsi pelaku UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis sAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*.
- Kalsum, U., Ikhtiari, K., & Dwiyanti, R. (2020). LAPORAN KEUANGAN UMKM DI FOOD CITY PASAR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(November), 92–103. <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2>
- Kareja, N., Alfiah, N., & Setiadevi, S. (2022). TANTANGAN PENINGKATAN PENERAPAN SAK EMKM PADA UMKM DI BANYUWANGI. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4(6), 2507–2515.
- Keban, Yaremis T. (2008) Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu, Jakarta. Gavamedia
- Kirowati, D. (2019). Implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan di era revolusi industri 4.0 (studi kasus pada umkm di kota madiun). *Jurnal aksi akuntansi dan sistem informasi*. <https://doi.org/10.32486/aksi.v4i1.316>
- Kusuma, I. C., & Lutfiany, V. (2019). persepsi UMKM dalam memahami SAK EMKM. *Jurnal Akunida*. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1550>
- Luchindawati, D. S., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). ANALISIS KESIAPAN UMKM BATIK DI KOTA MADIUN DALAM PENERAPAN SAK EMKM. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 241–249. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.2.1154.190-196> Abstract
- Madawaki, A. (2012). Adoption of international financial reporting standards in developing countries: the case of Nigeria. *International Journal of Business and Management*. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n3p152>
- Magdi, Y., Samy, A., Abbas, A. M., Ibrahim, M. A., Edris, Y., El-Gohary, A., Fathi, A. M., & Fawzy, M. (2019). Effect of embryo selection based morphokinetics on IVF/ICSI outcomes: evidence from a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. In *Archives of Gynecology and Obstetrics*. <https://doi.org/10.1007/s00404-019-05335-1>
- Mandey, J., M., Saerang, D. P., & J.Pusung, R. (2018). Studi Kualitatif Tentang Manfaat Dan Kerugian Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UD Mitra Pelita. 13(2), 589– 598.
- Mukoffi, A., & Sulistiyowati, Y. (2019). The Role of financial accounting standards for small and medium micro economic sectors: case studies in lowokwaru district, Malang. *International journal of research in business and social science*
- Notoatmodjo, S. (2012) Metodologi Penelitian Kesehatan. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta
- Nuvitasari, A., Y, N. C., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341–347. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index%0AALOGO>

- Oke, D. F., Ologunwa, O. P., & Kolawole, S. S. (2021). Digital Financial Services and Risk Mitigation in Micro and Small Enterprises. *Fuoye Journal of Finance and Contemporary Issue*, 1(1), 144–155.
- Prasetyo, A. (2018). PENGARUH JENJANG PENDIDIKAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, LAMA BEKERJA DAN SOSIALISASI TERHADAP PERSEPSI IMPLEMENTASI SAK EMKM (Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Kendal). *Neraca*, 14(2), 54–65.
- Pratiwi, N. B., & Hanafi, R. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 79–98.
- Purba, M. A. (2019). ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA BATAM. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 3(2), 55–63.
- Purba, M. A., Program, D., Akuntansi, S., & Batam, U. P. (2019). Analisis penerapan SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Barelang*.
- Purwoko, K., Prasetyo, D., Wijayanti, L. E., & Setiawan, W. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Factors Affecting Compliance with Internal Control. 9(November), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pada UMKM Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Profita*, 11(2), 201–217. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.004>
- Rismawandi, R., Lestari, I. R., & Meidiyustiani, R. (2022). Kualitas SDM, Persepsi Pelaku UMKM, Pemahaman UMKM, Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM. *Owner*, 6(1), 580–592. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.608>
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, No. 1, 1–21
- Salmiah, N., Indarti, & Inova Fitri Siregar. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru). *Akuntansi*, 3(2), 212–226
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan Umkm Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora). *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1441>
- Siregar, D. M. (2021). Penerapan SAK EMKM para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menuju pengembangan revolusi industri 4 . 0 (studi pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol.16., 16(4), 669–678.
- Soraya, E. A., & Mahmud, A. (2016). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v5i1.9761>
- Sularsih, H., & Sobir, A. (2019). Penerapan akuntansi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *JAMSWAP Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Sulisti, T. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). *FLEPS 2019* -, 6(1), 1–46. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.125084>
- Sulistyowati, Y. (2017). Pencatatan Pelaporan Keuangan UMKM (Study Kasus di Kota Malang). 5(2), 49–55.

- Suraji, R. (2020). The Impact of Competitive Strategy and Intellectual Capital on SMEs Performance. *Jurnal Manajemen*, XXIV(03), 427-442. <http://dx.doi.org/10.24912/jm.v24i3.677>
- Suryani, T., Lindiawati & Rr. Iramani (2015) 'THE CHALLENGE OF FINANCIAL INCLUSION FOR SMALL AND MICRO ENTREPRISES IN INDONESIA', 1(1), pp. 1076- 1087.
- Susilowati, M., Marina, A., & Rusmawati, Z. (2021). PENGARUH SOSIALISASI SAK EMKM, PERSEPSI PELAKU UMKM, DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP PENERAPAN SAK EMKM PADA LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Sustainable*, 01(2), 240-255. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index%0AE-ISSN>
- Tan, J., Tyler, K., & Manica, A. (2007). Business-to-business adoption of eCommerce in China. *Information and Management*, 44(3), 332-351. <https://doi.org/10.1016/j.im.2007.04.001>
- Tuti, R., & Dwijayanti, P. F. (2016). AKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN UMKM DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (Jako)*, 8, 98-107
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat
- Williams, M. D., Dwivedi, Y. K., Lal, B., & Schwarz, A. (2009). Contemporary trends and issues in IT adoption and diffusion research. *Journal of Information Technology*, 24(1), 1-10. <https://doi.org/10.1057/jit.2008.30>
- Wulandari, D., & Arza, F. I. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAK EMKM pada UMKM Kota Padang 1, 2, 4(3), 465-481
- Zhou, K., Liu, T., & Zhou, L. (2016). Industry 4.0: towards future industrial opportunities and challenges. 2015. *Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2015*. <https://doi.org/10.1109/FSKD 2015.738228>